

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan komponen penting dalam laporan penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji strategi advokasi Greenpeace dalam menangani kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Dalam bagian ini, peneliti akan menyelidiki penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji isu-isu sejenis, seperti perubahan iklim, dampak kenaikan permukaan air laut, serta upaya advokasi organisasi lingkungan seperti Greenpeace. Peneliti akan mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut dan melihat bagaimana kontribusi mereka terhadap pemahaman tentang strategi-strategi advokasi yang efektif dalam menghadapi tantangan kenaikan permukaan air laut di daerah seperti Jakarta. Selain itu, peneliti juga akan mengidentifikasi kekosongan-kekosongan dalam pengetahuan yang masih ada dalam literatur terkait, yang akan menjadi landasan bagi penelitian ini untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Jakarta. Dengan demikian, bagian tinjauan literatur ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pemahaman konteks dan relevansi dari penelitian ini tentang strategi advokasi Greenpeace dalam menghadapi kenaikan permukaan air laut di Jakarta.

Sebelumnya, beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji bagaimana Greenpeace telah melakukan upaya advokasinya sebagai strategi dalam membantu menangani masalah lingkungan di berbagai belahan dunia. Dalam penelitian yang berjudul “Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok”, Parameswari (2016) bertujuan untuk memahami kekuatan LSM melalui strategi kampanye advokasi untuk mengubah perilaku atau kebijakan aktor lain dengan menganalisis advokasi Greenpeace pada Detox Campaign on Fashion in China, pada periode 2011 hingga 2013. Menurut penelitian tersebut, strategi advokasi utama yang digunakan oleh Greenpeace

adalah kampanye meliputi politik informasi, politik pengaruh, politik simbolik, dan politik akuntabilitas. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara Greenpeace sebagai NGO dengan target aktor yaitu global brand fashion, masyarakat global dan aktor negara, China. Studi ini menemukan bahwa strategi kampanye berhasil mempengaruhi aktor sasaran untuk mengubah perilaku dan kebijakan mereka terkait isu pencemaran air di China (Parameswari, 2016).

Secara konseptual, antara penelitian tersebut dan penelitian yang penulis lakukan, keduanya mengeksplorasi peran dan strategi advokasi Greenpeace sebagai LSM transnasional dalam mempengaruhi kebijakan atau perilaku aktor lain. Kesamaan utama adalah pemanfaatan berbagai bentuk politik, seperti politik informasi, pengaruh, simbolik, dan akuntabilitas, sebagai alat untuk mencapai tujuan advokasi. Namun, perbedaan signifikan terletak pada konteks isu yang dihadapi, di mana penelitian Parameswari berkaitan dengan isu pencemaran air di China, sedangkan penelitian ini berfokus pada kenaikan permukaan air laut di Jakarta, yang melibatkan tantangan geografis dan lingkungan yang berbeda. Selain itu, perbedaan lain yang mencolok adalah aktor sasaran. Penelitian Parameswari menyoroti peran Greenpeace dalam mempengaruhi global brand fashion, masyarakat global, dan aktor negara, khususnya di China. Di sisi lain, penelitian ini akan mempertimbangkan keterlibatan Greenpeace dengan aktor seperti pemerintah daerah Jakarta, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan setempat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelajahi dinamika dan tantangan yang berbeda dalam menjalankan strategi advokasi di tingkat lokal dan dalam konteks perubahan iklim yang khusus.

Pada penelitian lain oleh Albertus (2021) berjudul “Jaringan Advokasi Transnasional: Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara”, penulis membahas bagaimana Greenpeace, sebuah organisasi non-pemerintah, memengaruhi rencana Shell untuk pengeboran lepas pantai Arktik. Temuan penulis kemudian menunjukkan bahwa Greenpeace telah menggunakan setiap taktik strategi TAN, termasuk politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, untuk memengaruhi kebijakan Shell. Setelah melakukan advokasi selama kurang lebih tiga tahun, Greenpeace berhasil membujuk Shell untuk menghentikan rencana pengeborannya. Penulis melanjutkan

dengan mengatakan bahwa keempat strategi ini pada akhirnya berhasil membuat Shell membatalkan rencananya untuk melakukan pengeboran lepas pantai di Kutub Utara (Albertus, 2021).

Secara konseptual, antara penelitian tersebut dan penelitian yang penulis lakukan, keduanya menggambarkan peran penting LSM transnasional seperti Greenpeace dalam memengaruhi kebijakan atau perilaku perusahaan besar seperti Shell dalam konteks isu lingkungan. Kesamaan yang mencolok adalah penggunaan berbagai strategi advokasi transnasional, termasuk politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, oleh Greenpeace untuk mencapai tujuannya. Hasil penelitian Albertus menunjukkan bahwa kombinasi strategi-strategi ini mampu mempengaruhi kebijakan Shell dan menghentikan rencana pengeboran mereka di Kutub Utara, yang merupakan pencapaian signifikan dalam upaya pelestarian lingkungan. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks isu yang dihadapi. Sementara Albertus mengeksplorasi isu pengeboran minyak di Kutub Utara, penelitian ini akan berfokus pada isu kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Hal ini mengimplikasikan perbedaan tantangan lingkungan, geografis, dan aktor yang terlibat, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan setempat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempertimbangkan dinamika yang unik dalam konteks Jakarta yang berbeda dengan Kutub Utara (Albertus, 2021).

Selain itu, penelitian terkait advokasi greenpeace di Indonesia juga telah dilakukan oleh Novaradila & Utomo (2022) dalam penelitian yang berjudul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Dalam Menangani Isu Ekologi di Indonesia: Studi Kasus Riau Tahun 2011-2018”. Dalam penelitian tersebut, peneliti bertujuan untuk menjelaskan taktik yang digunakan oleh jaringan advokasi global Greenpeace untuk mengatasi masalah lingkungan di Indonesia dalam studi kasus Riau tahun 2011 hingga 2018, yang merupakan masa berlakunya kebijakan moratorium hutan. Berdasarkan temuan studi ini, Greenpeace telah menggunakan empat strategi jaringan advokasi transnasional, antara lain: (1) politik informasi, yang melibatkan penyebaran laporan investigasi; (2) politik simbolik, yang melibatkan aktivitas kreatif; (3) politik pengaruh, yang melibatkan persuasi dan pencekikan aktor yang lebih kuat; dan (4) akuntabilitas politik, yang menyoroti

kesenjangan antara wacana dan praktik. Melalui aksi politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, Greenpeace menggunakan kasus deforestasi dan masalah ekologi di Riau yang disebabkan oleh industri kelapa sawit dan pulp/HTI untuk menekan pemerintah menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2018 moratorium tentang izin perkebunan kelapa sawit, HTI, dan pertambangan (Novaradila & Utomo, 2022).

Konsep utama yang dapat ditemukan baik dalam penelitian tersebut penelitian ini adalah peran kunci LSM transnasional seperti Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan atau praktik lingkungan di tingkat nasional. Baik penelitian Novaradila & Utomo maupun penelitian ini akan mengeksplorasi penggunaan berbagai strategi advokasi, termasuk politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas oleh Greenpeace. Hasil penelitian Novaradila & Utomo menunjukkan bahwa kombinasi strategi-strategi ini efektif dalam mendorong pemerintah untuk mengeluarkan moratorium terkait perkebunan kelapa sawit, HTI, dan pertambangan di Riau. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks isu yang dihadapi. Penelitian Novaradila & Utomo berfokus pada isu deforestasi dan ekologi di Riau, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kenaikan permukaan air laut di Jakarta, yang memiliki karakteristik dan tantangan lingkungan yang berbeda. Selain itu, aktor-aktor yang terlibat juga dapat berbeda, seperti pemerintah daerah Jakarta, masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan setempat dalam penelitian ini (Novaradila & Utomo, 2022)

Pada penelitian yang berjudul “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International”, Virgy, (2020) menganalisis Bagaimana rencana Greenpeace Indonesia untuk menggunakan teori jaringan advokasi transnasional untuk menekan dan mengawasi tindakan aktor target. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia paling efektif dalam menerapkan politik informasi dan memanfaatkan strategi politik. Strategi Politik Simbolik dipraktikkan oleh Greenpeace Indonesia dengan cara yang provokatif dan inovatif. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa LSM lingkungan lainnya, terutama yang berbasis domestik, tampaknya tidak diizinkan untuk melakukan tindakan Greenpeace Indonesia. Disamping itu pada aspek Akuntabilitas Politik, di mana

Greenpeace Indonesia tidak memiliki komitmen Wilmar International dengan kekuatan yang mengikat secara hukum, adalah yang terlemah dari empat strategi (Virgy, 2020).

Konsep utama yang dapat ditemukan dalam kedua penelitian ini adalah peran LSM transnasional, seperti Greenpeace, dalam memengaruhi tindakan aktor target dalam konteks lingkungan. Sama seperti dalam penelitian ini, Virgy, et al. juga mengidentifikasi penggunaan berbagai strategi advokasi oleh Greenpeace, seperti politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh. Namun, perbedaan utama terletak pada isu yang ditangani. Penelitian Virgy, berkaitan dengan isu deforestasi oleh Wilmar International di Indonesia, sementara penelitian ini fokus pada kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Isu-isu ini memiliki tantangan dan aktor yang berbeda, seperti perusahaan industri kelapa sawit dalam penelitian Virgy, dan pemerintah daerah serta masyarakat lokal dalam penelitian ini (Virgy, 2020).

Selain itu, penelitian Virgy, juga mencatat kelemahan dalam strategi advokasi Greenpeace Indonesia, terutama dalam aspek akuntabilitas politik. Ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi penelitian ini, yang akan mempertimbangkan tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi oleh Greenpeace dalam menghadapi kenaikan permukaan air laut di Jakarta. Dengan demikian, walaupun terdapat kesamaan dalam penggunaan strategi advokasi oleh Greenpeace, penelitian ini akan mempertimbangkan perbedaan kontekstual yang signifikan dalam upaya mengatasi isu lingkungan yang berbeda, dengan tujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas strategi advokasi dalam berbagai konteks geografis dan isu-isu lingkungan yang beragam (Virgy, 2020).

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bagaimana konsep TAN dapat digunakan untuk mengkaji upaya advokasi Greenpeace dalam mengatasi masalah kelangkaan. Selain itu, dapat diketahui keterbaruan dari penelitian yang peneliti gagas yaitu bagaimana upaya advokasi Greenpeace terhadap isu kenaikan permukaan air laut sebagai isu yang belum pernah dikaji sebelumnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 English School

English School (ES) atau Mazhab Inggris adalah teori perspektif hubungan internasional yang menekankan konsep masyarakat global. Teori-teori yang dikemukakan disebut berasal dari English School karena berasal dari atau memiliki pengaruh kuat dari sarjana dan pemikir politik Inggris.

International system, International society, dan world society adalah tiga konsep utama yang mendasari pemikiran English School. Menurut Hedley Bull (1977), sistem internasional diartikan sebagai “dua negara atau lebih memiliki kontak yang cukup di antara mereka dan memiliki pengaruh yang cukup terhadap keputusan satu sama lain untuk menyebabkan mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan (dalam satu kesatuan)” sebelum sistem internasional terbentuk. Sesuai dengan definisi ini, sistem internasional memberi bobot lebih pada perebutan kekuasaan antar negara, yang keputusannya ditentukan oleh kerangka anarki global. Sementara itu, masyarakat internasional, menurut pendapat Bull, muncul ketika “kumpulan negara yang berbagi nilai yang sama menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungan mereka satu sama lain, dan berbagi, saling membantu, dalam pekerjaan lembaga bersama yang mereka miliki”. Dengan kata lain, pengembangan dan pemeliharaan norma, hukum, dan institusi umum penting bagi komunitas global. Sementara itu pada konteks ketiga, Bull (1977) menyatakan bahwa “karena unit utama dari masyarakat besar ini bukanlah negara, melainkan individu manusia secara keseluruhan, masyarakat dunia lebih mendasar daripada masyarakat internasional”. Dengan melakukan ini, komunitas dunia melampaui batas-batas struktur negara dan mengalihkan perhatian identitas dan institusi masyarakat global terhadap individu, aktor non-negara, dan akhirnya populasi dunia (Hedley Bull, 1977)

Penting untuk diperhatikan bahwa istilah "institusi" yang digunakan dalam konteks ini memiliki arti yang berbeda dengan istilah "organisasi". Dalam pandangan English School, institusi bukanlah struktur (organisasi) birokrasi internasional yang mungkin diciptakan untuk memfasilitasi interaksi negara, melainkan praktik lama antar negara (seperti hukum, perang, dan diplomasi). English School menyebut organisasi internasional sebagai "*pseudo institution*" atau

"lembaga sekunder" untuk menekankan bahwa kinerja lembaga internasional utama memengaruhi seberapa efektif organisasi internasional.

Untuk menguraikan lebih lanjut konsep "*world society*" atau masyarakat dunia, Buzan (2004) mendefinisikan konsep ketiga tersebut sebagai "gagasan tentang norma dan nilai bersama pada tingkat individu tetapi melampaui negara". Hal ini dibentuk oleh identitas masyarakat global dan pengaturan individu, organisasi non-negara, dan populasi global secara keseluruhan. Ia berargumentasi bahwa *international society* atau masyarakat internasional bukanlah titik awal dalam perjalanan sejarah dari anarki menuju masyarakat dunia, melainkan bahwa masyarakat internasional tidak dapat berkembang lebih jauh tanpa adanya perkembangan paralel dalam masyarakat dunia yang bersangkutan; yaitu dengan berkembangnya unsur "kebudayaan dunia" pada tingkat massa (Buzan, 2004).

Secara garis besar, masyarakat dunia lebih diasosiasikan dengan pemikiran idealis: sebuah perkembangan yang mungkin dan diinginkan di masa depan dan, sebagai sebuah tren saat ini, adalah bahwa masyarakat dunia seringkali dipandang bertentangan dengan keunggulan negara. Kaitan dengan realisme dan idealisme ini sangat disayangkan karena memperkuat kecenderungan untuk menganggap gagasan-gagasan tersebut saling bertentangan: negara-negara bertindak sebagai benteng identitas yang saling eksklusif yang mencegah munculnya warga negara dunia atau kosmopolitanisme global yang tentu saja melemahkan identitas dan legitimasi negara dan negara. sehingga merusak fondasi masyarakat internasional (Buzan, 2004). Buzan juga berpendapat bahwa masyarakat dunia tidak dapat muncul kecuali didukung oleh kerangka politik yang stabil dan sistem negara tetap menjadi satu-satunya kandidat untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, implikasi metodologisnya adalah bahwa "masyarakat dunia" merupakan hal yang menarik untuk menjadi fokus kajian, baik sebagai objek pertumbuhan dan pembangunan, maupun sebagai sumber perubahan, terutama dalam konteks sistem negara yang terus berubah (Buzan, 2004).

2.2.2 Transnational Advocacy Network

Transnational Advocacy Network (TAN) didefinisikan oleh Keck & Sikkink (2014) dalam bukunya "Activist Beyond Borders" sebagai hubungan atau interaksi yang dikembangkan melalui berbagi pengetahuan dan dukungan di antara aktor non-negara yang berpikiran sama. dengan cara yang sama, dengan mengangkat masalah ini ke skala global. Jaringan Advokasi Transnasional dapat mengalami masalah karena tiga faktor: (1) Saluran antara kelompok domestik dan pemerintah diblokir atau terputus, sehingga saluran tidak efektif dalam menyelesaikan konflik dan menyebabkan pola bumerang dari jaringan; (2) Aktivis berpikir bahwa membangun jaringan lintas batas akan membantu mereka melanjutkan misi mereka di masa depan; dan (3) percaya bahwa meningkatkan hubungan interaksi dilakukan dengan menarik perhatian publik, memasuki kancah internasional, dan memperkenalkan isu-isu, seperti dalam kegiatan konferensi (Keck & Sikkink, 2014)

Jika dibandingkan dengan politik internasional, politik transnasional menunjukkan pola interaksi yang berbeda. Politik internasional disebut sebagai politik "*nation-centric*" atau berpusat pada suatu negara, dan didasarkan pada aktivitas diplomasi tradisional, menurut Nye & Keohane (1971). Alasan disebut *nation-centric* karena pemerintah negara bertindak sebagai wakil masyarakat ketika berinteraksi dengan pemerintah di luar negeri. Politik transnasional, di sisi lain, juga mengakui keterlibatan aktor non-negara dalam politik global. Aktor non-negara, seperti LSM, kelompok organisasi, atau individu, memimpin dalam menjalin hubungan dengan aktor non-negara lainnya dalam interaksi transnasional (Nye & Keohane, 1971).

Disebut jaringan advokasi karena pelaku TAN bekerja membela dan mendukung individu atau kelompok lain dalam membangun jaringan interaksi. Suatu jaringan TAN, dipimpin oleh sekelompok organisasi masyarakat sipil yang otonom, biasanya tidak berafiliasi dengan partai politik atau bisnis apa pun, dan beroperasi secara sukarela (nirlaba). Aktor dalam TAN didukung oleh para aktivis (pengusaha politik) yang berorganisasi dan berhubungan dengan aktor lain. Menurut Keck & Sikkink, TAN dapat terdiri dari tujuh aktor berbeda, termasuk: 1) Pakar dan peneliti; 2) Gerakan Sosial; 3) Yayasan; 4) Media; 5) Organisasi

keagamaan; 6) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di tingkat nasional dan internasional; 7) Serikat pekerja dan pelaku dalam kegiatan perdagangan; dan 8) badan eksekutif atau parlementer yang merupakan bagian dari pemerintah (Keck & Sikkink (2014).

Tidak perlu semua aktor ini terlibat dalam advokasi jaringan; itu bisa menjadi kombinasi dari mereka. Peran LSM dalam skala nasional dan internasional dalam advokasi jaringan transnasional berkisar dari membangun jaringan hingga mengambil tindakan terhadap target seperti pemerintah atau aktor lain yang lebih kuat. Pelaku konsep TAN tidak mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi yang superior, tetapi kadang-kadang memberikan pengaruh signifikan yang membuat mereka tidak dapat dihindari (Keck & Sikkink, 2014). Dengan kemampuan ini, mereka dapat berpartisipasi dan mengubah debat kebijakan selain bekerja untuk mempengaruhi hasil kebijakan (Barnett, 2005). Jaringan advokasi transnasional berusaha mencapai keadilan global sejalan dengan standar universal dan nilai-nilai kosmopolitan melalui semangat bersama (Buzan, 2004).

Menurut Keck & Sikkink (2014), terdapat 4 (empat) taktik yang dapat digunakan suatu jaringan TAN dalam mewujudkan pengaruh dan tujuannya, diantaranya yaitu:

1. Politik informasi; penggunaan informasi terkait untuk "memobilisasi" atau "mempolitisasi" target dengan mengarahkan informasi ini ke lokasi yang dapat memberikan dukungan dan pengaruh paling besar. Media memainkan peran penting dalam politik informasi dengan menciptakan jaringan atau sekutu untuk menarik perhatian, menjangkau audiens yang besar, dan menggunakan metode dramatis (media framing).

2. Politik simbolik; penggunaan suatu konsep atau barang yang dapat berfungsi sebagai simbol untuk menyampaikan kepada masyarakat umum arti penting suatu peristiwa dan tujuan yang ingin dicapai melalui simbol tersebut. Pemahaman simbol oleh masyarakat umum sangat penting karena dapat meningkatkan pengaruh dan meningkatkan kesadaran.

3. Memanfaatkan Politik untuk Keuntungan; melibatkan aktor yang lebih kuat untuk dapat mempengaruhi situasi yang dihadapi dengan memberikan bantuan dalam bentuk materi seperti uang dan barang, atau hal non materi seperti

memberikan tekanan dengan menciptakan "mobilisasi rasa malu" di mana perilaku target menyimpang dari moral dan kewajiban internasional dapat dimanfaatkan di arena internasional, meningkatkan tekanan pada target.

4. Politik Akuntabilitas: terlibat dalam politik dengan menentang kebijakan target dan berusaha membujuk target untuk mengubah kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima. Dokumen hukum dan tertulis harus digunakan untuk mengimplementasikan perubahan sebelum dapat dimintai pertanggungjawaban. Komitmen tersebut menjadi acuan bagi masyarakat internasional untuk memantau perilaku dan praktik target terhadap komitmen yang ada.

Selanjutnya, membangun framing yang sama diperlukan untuk keempat strategi tersebut. Pembingkaiian yang sama ini merujuk pada pembingkaiian isu yang diperdebatkan, tujuan atau sasaran, sasaran masyarakat, cara-cara menarik perhatian masyarakat dan melibatkan masyarakat, serta mengidentifikasi lembaga mana yang akan diuntungkan. Dengan framing, aksi kolektif transnasional tercipta, yang mengharuskan gerakan domestik bergabung dengan aktivis dari negara lain untuk membentuk koalisi transnasional untuk menekan negara lain, aktor internasional, dan lembaga internasional (Porta & Tarrow, 2005).

2.3 Asumsi Penelitian

Adapun asumsi dasar yang melandasi penelitian ini yaitu : "Greenpeace Indonesia berupaya berkontribusi dengan cara melakukan strategi transnational advocacy network dalam menangani kenaikan air laut di Jakarta. Strategi advokasi tersebut di tunjukan dengan : membuat Film "Tenggelam Dalam Diam" sebagai *information politics*, menyuarakan tagar #BumiButuhAksi sebagai *symbolic politics*, bekerja sama dengan Greenpeace East Asia sebagai *leverage politics* yang dilakukan, dan menggunakan Paris Agreement sebagai *accountability politics* nya.

2.4 Kerangka Analisis

